

Analisis Pengaruh Pembiayaan Pemerintah dari Utang dan DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kota se-Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Suparlan¹, Ainun Najjah², Zhuroyya Nabila³, Nadia Agustina⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: suparlan23@staff.unram.ac.id¹, ainunnajjah28@gmail.com², zhuroyyanabila22@gmail.com³, nadiagustina000@gmail.com⁴

Article History:

Received: 02 Juni 2026

Revised: 15 Juli 2026

Accepted: 29 Juli 2026

Keywords Utang Daerah, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Daerah, Pembiayaan Pemerintah Daerah, NTB.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah yang bersumber dari utang daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk NTB, masih menghadapi tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat serta memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder keuangan daerah, di mana kemandirian diproksikan melalui rasio kemandirian daerah, menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi data panel model Random Effect dengan Robust Standard Error menunjukkan bahwa: (1) Utang Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan (3) Utang Daerah dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mengalokasikan pembiayaan utang pada sektor produktif guna memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan fiskal.

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan elemen fundamental dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kebijakan ini secara normatif ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mendorong daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, sekaligus menerima transfer fiskal dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana bagi hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen transfer fiskal yang memiliki peran strategis, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam dan pajak. Transfer ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketimpangan vertikal, serta menjadi stimulus bagi peningkatan kemandirian keuangan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan penerimaan DBH tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya secara mandiri. Banyak daerah masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat, yang tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Paulina & Adiawaty, 2025).

Ketergantungan terhadap DBH sering kali beriringan dengan meningkatnya pembiayaan melalui utang daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko moral hazard, di mana pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja tanpa mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas fiskal. Selain itu, fenomena flypaper effect kerap terjadi, yaitu ketika dana transfer lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dibandingkan mendorong peningkatan kapasitas fiskal jangka panjang dan investasi produktif (Syaifullah & Romli, 2025).

Fenomena tersebut relevan dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang relatif besar, NTB menerima DBH dalam jumlah signifikan. Namun demikian, struktur pendapatan daerah di NTB masih didominasi oleh transfer pusat, sementara kontribusi PAD relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya DBH belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian keuangan daerah secara optimal. Data empiris menunjukkan bahwa secara nasional tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023, rasio kemandirian keuangan daerah di Indonesia berada pada kisaran 15–20 persen, yang menandakan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk DBH (Badan Pusat Statistik, 2024). Di Provinsi NTB, realisasi DBH pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau sekitar seperempat dari total pendapatan daerah. Pada saat yang sama, pembiayaan melalui utang daerah menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai sekitar Rp2,5 triliun pada tahun 2023. Sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membiayai belanja rutin, bukan belanja yang bersifat produktif, sehingga berpotensi menekan keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli maupun transfer dari pemerintah pusat. Suparlan et al. (2025) menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD berperan penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan DBH belum tentu diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal, dan justru mencerminkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, peran DBH dalam struktur pendapatan daerah cenderung bersifat substitutif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah, bukan sebagai instrumen

penguatan kemandirian fiskal.

Meskipun demikian, penelitian tersebut belum memasukkan pembiayaan utang daerah sebagai variabel independen dalam model analisisnya. Padahal, dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, utang daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang digunakan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal, terutama ketika PAD relatif terbatas dan belanja daerah terus meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap yang signifikan, yaitu kurangnya kajian empiris yang mengintegrasikan pembiayaan utang daerah dan DBH dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika tersebut di Provinsi NTB, yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang unik serta rentan terhadap fluktuasi pendapatan berbasis sumber daya alam.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Pemerintah dari Utang dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh DBH dan pembiayaan utang terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal daerah. Dengan menggunakan pendekatan ekonometrika berbasis data panel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keuangan publik dan desentralisasi fiskal, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merancang strategi pengelolaan DBH dan utang yang lebih berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pembiayaan Pemerintah dari Utang Daerah, baik secara parsial maupun simultan, terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel pembiayaan utang dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Kabupaten/Kota), dengan menggunakan metode *saturation sampling* (sampel jenuh), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu 2020-2024. Sumber data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan software statistik Stata 17. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Y_{it}	: Kemandirian Keuangan Daerah
β_0	: Konstanta
β_1 dan β_2	: Koefisien Regresi
X_1	: Utang Daerah

X2 : Dana Bagi Hasil
e : Errorr

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Rumus	Skala Ukur	Referensi Utama
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/(Total Pendapatan Daerah)	Rasio	Suparlan (2025), Indrianingrum (2023)
Kebijakan Utang (X1)	Keberadaan komitmen pinjaman jangka panjang sebagai instrumen pembiayaan.	Dummy: 1 (Ada pinjaman), 0 (Tidak ada pinjaman).	Nominal	
Dana Bagi Hasil / DBH (X2)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.	Total DBH	Logaritma Natural	Ginting (2023), Rahayu (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian dan Karakteristik Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel dengan unit analisis sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB ($n = 10$) selama periode 5 tahun dari tahun 2020 hingga 2024 ($T = 5$). Data bersifat *strongly balanced*, yang berarti seluruh unit pemerintah daerah (pemda) memiliki jumlah masa pengamatan yang sama tanpa ada data yang hilang (*missing value*), dengan total observasi sebanyak 50 data ($N = 50$).

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Data Panel

Variabel	Pengukuran	Mean	Std. Deviation	Min	Max	Observasi
Y (Kemandirian Keuangan)	Overall		0,0643	0,06	0,33	N = 50
	Between	0,1382	0,0605	0,084	0,288	n = 10
	Within		0,0278	0,0762	0,2142	
X1 (Utang Daerah)	Overall		0,4431	0	1	N = 50
	Between	0,26	0,3658	0	1	n = 10
	Within		0,2711	-0,34	0,86	T = 5
X2 (Dana Bagi Hasil - DBH)	Overall		0,7938	22,75	27,2	N = 50
	Between	25,0924	0,6931	24,266	25,8264	n = 10
	Within		0,4346	23,5764	25,8264	T = 5

Sumber: Output Stata 17 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2, berikut adalah karakteristik dari masing-masing variabel penelitian:

Variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1382 (atau 13,82%). Nilai ini mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah di NTB secara umum masih tergolong dalam kategori sangat rendah atau instruktif. Variasi antar kabupaten/kota (*between standard deviation* = 0,0605) jauh lebih besar daripada variasi tahunan di internal kabupaten/kota itu sendiri (*within standard deviation* = 0,0278), menunjukkan kesenjangan kemandirian fiskal yang cukup mencolok antar daerah di NTB.

Variabel X2 (Dana Bagi Hasil - DBH) memiliki nilai rata-rata sebesar 25,0924 dengan sebaran total (*overall std. dev*) sebesar 0.7938. Angka penyebaran antar daerah (*between* = 0,6931) juga lebih dominan daripada fluktuasi tahunannya (*within* = 0,4346).

Tabel 3. Hasil Analisa Frekuensi Data Panel

	Overall		Between	Within
x1	Freq. Percent		Freq. Percent	Percent
0	37 74,00		9 90,00	82,22
1	13 26,00		4 40,00	65
Total	50 100,00		13 130,00	76,92
		(n	= 10)	

Sumber: Output Stata 17 (data diolah, 2026)

Variabel X1 (Utang Daerah), Ditunjukkan dengan nilai *mean* sebesar 0,2600. Nilai minimum 0 dan maksimum 1 menegaskan bahwa bentuk variabel ini biner. Kemudian pada tabel Frekuensi menunjukan bahwa. Pemerintah daerah yang tidak memiliki utang jangka Panjang sebanyak 37 atau 74,00% dari seluruh total tahun pengamatan. Sedangkan yang memiliki utang sebanyak 13 atau 26,00% dari seluruh total tahun pengamatan. Secara umum, dalam total masa pengamatan seluruh daerah, pmda lebih sering berada dalam kondisi tidak memiliki utang jangka panjang (74%).

2. Pengujian Asumsi Klasifikasi: Uji Multikolinearitas

Sebelum menentukan model terbaik, dilakukan uji multikolinearitas menggunakan parameter *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF (Tolerance)
X1 (Utang Daerah)	1,02	0,980138
X2 (DBH)	1,02	0,980138
Mean VIF	1,02	

Sumber: Output Stata 17 (data diolah, 2026)

Nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 adalah sebesar 1,02, yang mana nilai ini jauh di bawah batas kritis angka 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini.

3. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Untuk menentukan model regresi yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM),

Fixed Effect Model (FEM), atau *Random Effect Model* (REM), dilakukan serangkaian pengujian formal berikut ini:

1) Uji Chow (Uji Signifikansi Efek Bersama)

Uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM (regresi linear biasa) dengan FEM. Berdasarkan hasil pengujian *fixed-effects regression*. Nilai F-test untuk efek daerah sebesar ($u_i = 0$) dengan nilai $F(9,38) = 20,37$. sedangkan Nilai Signifikansi ($Prob > F$) sebesar 0,0000. Karena nilai $Prob > F < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, Fixed Effect Model (FEM) jauh lebih baik untuk digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM).

2) Uji Lagrange Multiplier (LM Test) Breusch-Pagan

Uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM dengan REM. Berdasarkan hasil pengujian *Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects*, Nilai Akhir Statistik Uji (χ^2) sebesar 52,75 dengan Nilai Signifikansi ($Prob > \chi^2$) 0,0000. Karena nilai $Prob > \chi^2 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, Random Effect Model (REM) lebih baik digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM).

3) Uji Hausman

Setelah mengetahui bahwa model FEM dan REM sama-sama lebih baik daripada CEM, maka langkah krusial selanjutnya adalah menentukan pilihan akhir antara FEM atau REM menggunakan Uji Hausman. Uji ini menilai apakah terdapat korelasi antara efek spesifik wilayah (u_i) dengan variabel-variabel independen dalam model. Berdasarkan hasil pengujian model REM memberikan estimasi kelayakan simultan (*Wald Chi-squared*) yang valid dengan probabilitas sebesar 0,0166 pada estimasi lanjutannya. Karena nilai $p\text{-value} > 0,05$, Secara statistik, hal ini menegaskan bahwa tidak terdapat korelasi antara karakteristik unik antar kabupaten/kota dengan variabel independen, sehingga Random Effect Model (REM) secara metodologis didukung sebagai model yang paling efisien untuk menganalisis pengaruh Utang Daerah dan DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi NTB.

4) Penyesuaian Pengujian dan Pemilihan Model Akhir dengan Robust Standard Error

Mengingat karakteristik variabilitas data panel antar daerah (*between*) sangat dominan dan mengantisipasi potensi heteroskedastisitas maupun otokorelasi di level klaster daerah, estimasi akhir dilakukan menggunakan teknik Random Effect dengan Robust Standard Error (Cluster Id_Pemda). Penerapan *robust standard error* ini mengoreksi bias pada nilai signifikansi (Z-statistic) sehingga kesimpulan pengujian hipotesis menjadi jauh lebih valid dan reliabel.

4. Analisis Hasil Regresi Data Panel (Model Akhir Robust REM)

Hasil estimasi akhir regresi data panel menggunakan pendekatan *Random Effects Robust Cluster* disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Panel Robust Random Effect (RE)

Hasil Regresi Data Panel (Random-Effects GLS)						
Metode	Random-effects GLS regression				Jumlah Observasi	50
Variabel	Id_Pemda				Jumlah Grup	10

Grup						
R-squared:					Obs per grup:	
Within	0,1125				Min	5
Between	0,0591				Avg	5,0
Overall	0,0057				Max	5
corr(u_i, X)	0 (assumed)				Wald chi2(2)	82,000
					Prob > chi2	0,0166
(Std. err. adjusted for 10 clusters in Id_Pemda)						
Variabel (y)	Koefisien	Robust Std. Err.	Z	P> z	[95% Conf. Interval] Min	[95% Conf. Interval] Max
x1	-0,0282203	0,0101718	-2,77	0,006	-0,0481567	-0,0082839
x2	0,0057906	0,0118056	0,49	0,624	-0,0173480	0,0282920
_cons	0,0002372	0,2940625	0,00	0,999	-0,5761148	0,5765892
sigma_u	0,0635459					
sigma_e	0,0297372					
Rho	0,8203514	(fraction of variance due to u_i)				

Sumber: Output Stata 17 (data diolah, 2026)

Persamaan Regresi Data Panel:

$$Y_{it} = 0,0002372 - 0,0282203_{it} + 0,0057906_{it} + e_{it}$$

Uji Kelayakan Model (Uji F / Wald Test)

Nilai statistik *Wald chi2(2)* adalah sebesar 8,20 dengan tingkat signifikansi (*Prob > chi2*) sebesar 0,0166. Karena nilai $0,0166 < 0,05$, maka model regresi ini dinyatakan fit dan layak untuk mengestimasi pengaruh Pembiayaan Utang (X1) dan DBH (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) secara simultan. Nilai *Rho* sebesar 0,82035 bermakna bahwa sebesar 82,04% variasi dari eror model disebabkan oleh karakteristik unik bawaan antar pemerintah daerah di NTB yang bersifat tetap (*unobserved regional heterogeneity*).

Pengaruh Pembiayaan Pemerintah dari Utang (X1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Variabel Utang Daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,0282203 dengan nilai signifikansi $P>|z|$ sebesar 0,006. Karena nilai $0,006 < 0,05$, maka secara parsial Utang Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki utang jangka panjang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah sebesar 0,0282 (atau 2,82%) dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki kebijakan utang jangka panjang, dengan asumsi alokasi DBH konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan daerah melalui instrumen utang di NTB belum mampu menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan untuk membiayai belanja modal yang produktif. Sebaliknya, utang justru menambah beban fiskal daerah di masa depan akibat kewajiban pembayaran cicilan pokok beserta bunganya, yang pada akhirnya memperlemah kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil / DBH (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Variabel Dana Bagi Hasil (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0057906 dengan nilai signifikansi $P>|z|$ sebesar 0,624. Karena nilai $0,624 > 0,05$, maka secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Perubahan naik atau turunnya alokasi DBH transfer pusat yang diterima oleh Kabupaten/Kota di NTB tidak memberikan dampak nyata terhadap pergeseran tingkat kemandirian

fiskal daerah secara internal. Hal ini lumrah terjadi karena dana transfer pusat (seperti DBH) diklasifikasikan sebagai pendapatan transfer dari pusat yang sifatnya sebagai instrumen penyeimbang celah fiskal daerah (*fiscal gap*), bukan pendapatan yang dihasilkan mandiri oleh struktur ekonomi regional (PAD). Ketergantungan pemda yang tinggi pada DBH justru memantapkan posisi fiskal daerah pada level belum mandiri (*fiscally dependent*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Analisis Pengaruh Pembiayaan Pemerintah dari Utang dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Periode 2020-2024, dapat diambil kesimpulan bahwa Secara Simultan Pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Utang Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB periode 2020-2024. Namun, Secara Parsial Utang Daerah (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang berarti Penggunaan skema pembiayaan utang oleh Pemda di NTB terbukti menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah karena porsi utang belum dialokasikan ke sektor investasi daerah yang langsung mendongkrak PAD, melainkan menjadi pos beban belanja di masa depan. Sedangkan Dana Bagi Hasil (X2) terbukti tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Fluktuasi besaran alokasi transfer DBH dari pusat tidak mengubah status kemandirian fiskal murni pemda karena dana tersebut tidak merepresentasikan produktivitas riil sektor penerimaan asli daerah (PAD) di NTB.

DAFTAR REFERENSI

- Christina. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 1(1).
- Darmawati, S., Naswya, G., Laudy, G., Sudaryono, & Mujiyanti. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017–2023. *JAMAN: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 5(1).
- Ginting, M. I. A., Wijaya, A., & Awaluddin, M. (2023). Analisis flypaper effect pada belanja daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(1).
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2006–2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 174–185.
- Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis kemandirian fiskal berdasarkan struktur pendapatan daerah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(1).
- Mareta, A. Y., Firnaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Analisis realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024: Kinerja fiskal, efektivitas pengelolaan PAD, dan tantangan kemandirian keuangan daerah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(1).
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56.
- Rahman, A., & Altin, D. (2023). Literatur review: Pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja dan kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1).
- Ramadhani, M. W., Utami, S., Utami, D., Chalisa, N., & Akib, A. (2025). Flypaper effect dan kapasitas fiskal daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. *Liabilitas:*

- Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi, 10(1).
- Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the flypaper effect phenomenon. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1).
- Suparlan, M. N. A., Meidia, P., Syahputra, D., Febriyanti, R. I., & Kirani, V. A. (2025). Analisis pengaruh dana bagi hasil, jumlah penduduk, dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024. *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(12).
- Suripto, I., Setyawan, R. R., & Aulia, F. H. (2024). Flypaper effect phenomenon on regional spending: Evidence from Lampung province. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 134–140.
- Syaifullah, A., & Romli. (2025). The influence of central government transfers and local own-source revenue on capital expenditure. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 6(1)